

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2015 telah melaksanakan 33 urusan, yaitu 25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Penyelenggaraan Urusan tersebut dilaksanakan melalui 78 program dan 1.036 kegiatan yang dilaksanakan oleh 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4.1 Penyelenggaraan Urusan Wajib.

Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Provinsi Banten mengacu pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib sebesar Rp4.110.111.573.455,- dan realisasi sebesar Rp3.162.155.320.167,- atau sebesar 76,94% dengan realisasi fisik sebesar 95,54%. Adapun Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015, sebagai berikut:

4.1.1 Urusan Wajib Pendidikan.

Pada Urusan Wajib Pendidikan didukung oleh 7 program dan 22 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Pendidikan Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Pendidikan sebesar Rp290.894.968.200,- dan realisasi sebesar Rp211.425.301.288,- atau sebesar 72,68% dengan realisasi fisik sebesar 79,31%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, dan (2)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan TK. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 91,97% dan realisasi keuangan sebesar 91,97%.

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Mutu, Akses, dan Tata Kelola Sekolah Dasar, (2)Kegiatan Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu dan Tata Kelola SMP, dan (3)Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 66,64% dan realisasi keuangan sebesar 66,64%.

3. Program Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Mutu, Akses dan Tata Kelola SMA, (2)Kegiatan Peningkatan Mutu dan Perluasan Akses Pendidikan Menengah Kejuruan, (3)Kegiatan Perluasan Akses, Sarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, dan (4)Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebudayaan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 67,60% dan realisasi keuangan sebesar 67,60%.

4. Program Peningkatan Mutu, Kesejahteraan dan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Formal, (2)Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal, dan (3)Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Formal. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,49% dan realisasi keuangan sebesar 94,49%.

5. Program Pendidikan Tinggi.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 76,24% dan realisasi keuangan sebesar 76,24%.

6. Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 6 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengembangan Program pada BPPNF, (2)Kegiatan Peningkatan Sumber Daya dan Penyediaan Peralatan pada BPPNF, (3)Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan, (4)Kegiatan Gerakan Pemberantasan Buta Aksara, (5)Kegiatan Perluasan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, dan (6)Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 69,97% dan realisasi keuangan sebesar 69,97%.

7. Program Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengembangan Teknologi Pendidikan pada Balai Teknologi dan Informasi, (2)Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SMAN CMBBS, dan (3)Kegiatan Pengembangan Komunikasi dan Informasi Pendidikan pada Balai Teknologi dan Informasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 88,23% dan realisasi keuangan sebesar 88,23%.

4.1.2 Urusan Wajib Kesehatan.

Pada Urusan Wajib Kesehatan didukung oleh 6 program dan 35 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Kesehatan, RSUD Banten dan RSUD Malingping**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Kesehatan sebesar Rp178.560.324.282,- dan realisasi sebesar Rp152.319.090.163,- atau sebesar 85,30% dengan realisasi fisik sebesar 96,17%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh **Dinas Kesehatan** dengan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat, (2)Kegiatan Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi, dan (3)Kegiatan

Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,26% dan realisasi keuangan sebesar 89,75%.

2. Program Pembinaan Upaya Kesehatan.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh **Dinas Kesehatan, dan RSUD Banten** yang terbagi atas 12 kegiatan, antara lain: Dinas Kesehatan melaksanakan 6 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Masyarakat, (2)Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, (3)Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin, (4)Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, (5)Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, dan (6)Kegiatan Peningkatan Pengendalian Mutu Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, dengan realisasi Fisik sebesar 97,97% dan realisasi keuangan sebesar 88,74%, sedangkan RSUD Banten melaksanakan 6 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten, (2)Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten, (3)Kegiatan Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan, (4)Kegiatan Pemantauan Pelayanan Kesehatan, (5)Kegiatan Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan, dan (6)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan, dengan realisasi Fisik sebesar 94,82% dan realisasi keuangan sebesar 84,39%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 96,40% dan realisasi keuangan sebesar 84,93%.

LKPJ Fisik 98,57%

3. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh **Dinas Kesehatan** dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, (2)Kegiatan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, (3)Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM), (4)Kegiatan Pembinaan Surveillance Epidemiologi, Imunisasi dan Penanggulangan Wabah, dan (5)Kegiatan Penyehatan

Lingkungan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 95,98% dan realisasi keuangan sebesar 82,93%.

4. Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh **Dinas Kesehatan** dengan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, dan (2)Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, Produksi dan Distribusi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,21%.

5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Malingping yang terbagi atas 6 kegiatan, antara lain: **Dinas Kesehatan** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Sertifikasi, Standarisasi dan peningkatan Mutu Sumber daya Manusia Kesehatan, (2)Kegiatan Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan (3)Kegiatan Pengembangan, Pembiayaan dan Pemeliharaan Kesehatan, (4)Kegiatan Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga, dan (5)Kegiatan Pengembangan Kesehatan Jiwa, dengan realisasi Fisik sebesar 88,48% dan realisasi keuangan sebesar 91,50%, sedangkan **RSUD Malingping** melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD Malingping, dengan realisasi Fisik sebesar 96,44% dan realisasi keuangan sebesar 82,89%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,46% dan realisasi keuangan sebesar 91,18%.

LKPJ 92,94% (realisasi fisik per kegiatan tdk sinkron dgn Lapbul Desember)

6. Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Malingping, dan RSUD Banten yang terbagi atas 7 kegiatan, antara lain: Dinas Kesehatan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan di

LKPJ 91,69% (realisasi fisik per kegiatan tdk sinkron dgn Lapbul)

RS dan Labkesda, (2)Kegiatan Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Surveillance Kesehatan kerja, dan (3)Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pekerja dan Masyarakat Dilingkungan Kerja, dengan realisasi Fisik sebesar 97,18% dan realisasi keuangan sebesar 93,21%, RSUD Malingping melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan RSUD Malingping, dan (2)Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, dengan realisasi Fisik sebesar 86,27% dan realisasi keuangan sebesar 67,33%, sedangkan RSUD Banten melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyediaan Rekam Medis dan Pelaporan, dan (2)Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Manajemen RSUD Banten, dengan realisasi Fisik sebesar 95,37% dan realisasi keuangan sebesar 82,59%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,94% dan realisasi keuangan sebesar 78,76%.

Permasalahan dan Solusi

1). Dinas Kesehatan

- a). **Permasalahan**
- b). **Solusi**

2). RSUD Banten

- a). **Permasalahan**
- b). **Solusi**

3). RSUD Malingping

- a). **Permasalahan**
- b). **Solusi**

4.1.3 Urusan Wajib Pekerjaan Umum.

Pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum didukung oleh 3 Program dan 55 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Bina Marga dan Tata Ruang**, dan **Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan

Wajib Pekerjaan Umum sebesar Rp1.966.970.855.021,- dan realisasi sebesar Rp1.400.040.117.051,- atau sebesar 71,18% dengan realisasi fisik sebesar 89,66%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh **Dinas Bina Marga dan Tata Ruang** dengan melaksanakan 24 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembangunan Jalan Wilayah Utara, (2)Kegiatan Pembangunan Jalan Wilayah Selatan, (3)Kegiatan Pembangunan Jembatan, (4)Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Tangerang, (5)Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Serang dan Cilegon, (6)Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Pandeglang, (7)Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Lebak, (8)Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong Jalan, (9)Kegiatan Pembangunan TPT, Talud dan Bronjong, (10)Kegiatan Pengadaan Lahan Kebinamargaan, (11)Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan, (12)Kegiatan Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan, (13)Kegiatan Pengadaan Alat-alat Ukur Kebinamargaan dan Pengujian Kualitas Bahan, (14)Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Tangerang, (15)Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Pandeglang, (16)Kegiatan Pembangunan Jalan Prioritas Tahun Jamak, (17)Kegiatan Pendataan Leger Jalan, (18)Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Perijinan Bidang Bina Marga dan Tata Ruang, (19)Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Tangerang, (20)Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Serang dan Cilegon, (21)Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Pandeglang, (22)Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Lebak, (23)Kegiatan Pembangunan Jalan Wilayah Utara (Peraturan Gubernur Nomor 49), dan (24)Kegiatan

Pembangunan Jalan Wilayah Selatan (Peraturan Gubernur Nomor 49). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 91,67% dan realisasi keuangan sebesar 78,77%.

2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh **Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman** dengan melaksanakan 21 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya, (2)Kegiatan Pengadaan Lahan Pengairan, (3)Kegiatan Pengelolaan Kualitas Air Pada Daerah Aliran Sungai, (4)Kegiatan Pengendalian Banjir, (5)Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane, (6)Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau, (7)Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna, (8)Kegiatan Pengadaan Bahan Banjiran, (9)Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai, (10)Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, (11)Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna, (12)Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau, (13)Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane, (14)Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sumber Daya Air, (15)Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Perizinan Bidang Sumber Daya Air, (16)Kegiatan Perencanaan Teknis Sungai, Irigasi, Embung dan Jaringan Pengairan Lainnya, (17)Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pemukiman dan SDA Terpadu, (18)Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Sumber Daya Air, (19)Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman, (20)Kegiatan Pengendalian Banjir (Peraturan Gubernur Nomor 49), dan (21)Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (Peraturan Gubernur Nomor 49).

Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,37% dan realisasi keuangan sebesar 60,58%.

3. Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh **Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman** dengan melaksanakan 10 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih, (2)Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan, (3)Kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan, (4)Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Penunjang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), (5)Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor di KP3B, (6)Kegiatan Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan, (7)Kegiatan Perencanaan DED Gedung Kantor dan Infrastruktur Keciptakaryaannya Lainnya, (8)Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Permukiman, (9)Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor di KP3B (Peraturan Gubernur Nomor 49), dan (10)Kegiatan Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan (Peraturan Gubernur Nomor 49). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 84,95% dan realisasi keuangan sebesar 51,31%.

Permasalahan dan Solusi

a). Permasalahan

b). Solusi

4.1.4 Urusan Wajib Perumahan.

Pada Urusan Wajib Perumahan didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Perumahan sebesar Rp50.296.262.000,- dan realisasi sebesar Rp46.004.598.650,- atau sebesar 91,47% dengan realisasi fisik sebesar 96,42%, pelaksanaan

program dimaksud adalah **Program Pembinaan dan Penataan Perumahan**.

Pelaksanaan program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, dan (2)Kegiatan Pembinaan dan Penataan Perumahan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 96,42% dan realisasi keuangan sebesar 91,47%.

Permasalahan dan Solusi

a). **Permasalahan**

b). **Solusi**

4.1.5 Urusan Wajib Penataan Ruang.

Pada Urusan Wajib Penataan Ruang didukung oleh 1 Program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** dan **Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Penataan Ruang sebesar Rp6.647.356.950,- dan realisasi sebesar Rp6.488.382.800,- atau sebesar 97,61% dengan realisasi fisik sebesar 99,04%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan**.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang yang terbagi atas 3 Kegiatan, antara lain: **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,03%, dan **Dinas Bina Marga dan Tata Ruang** melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Ruang, dan (2)Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan realisasi fisik sebesar 98,07% dan realisasi keuangan sebesar 98,10%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,04% dan realisasi keuangan sebesar 97,61%.

4.1.6 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan.

Pada Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan didukung oleh 3 program dan 18 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, dan Biro Pemerintahan Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan sebesar Rp28.565.950.800,- dan realisasi sebesar Rp26.032.120.882,- atau sebesar 91,13% dengan realisasi fisik sebesar 98,89%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, (2)Kegiatan Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah, (3)Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata, (4)Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan dan Agribisnis, (5)Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah, (6)Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban, (7)Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender, (8)Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran SDM, Budaya dan Keagamaan, dan (9)Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,73%.

2. Program Pengendalian Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terbagi atas 7 kegiatan, antara lain: **Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengendalian

Pelaksanaan Pembangunan, (2)Kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD, dan (3)Kegiatan Pengendalian Laporan Realisasi Barang/Jasa Se-Provinsi Banten, dengan realisasi fisik sebesar 97,04% dan realisasi keuangan sebesar 87,55%, dan **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program APBD, (2)Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya, (3)Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dan (4)Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Provinsi Banten, dengan realisasi fisik sebesar 99,64% dan realisasi keuangan sebesar 89,83%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,34% dan realisasi keuangan sebesar 88,36%.

3. Program Kerjasama Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terbagi atas 2 kegiatan, antara lain : **Biro Pemerintahan** melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri dengan realisasi fisik sebesar 96,67% dan realisasi keuangan sebesar 65,53%, dan **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,90%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,34% dan realisasi keuangan sebesar 81,99%.

4.1.7 Urusan Wajib Perhubungan.

Pada Urusan Wajib Perhubungan didukung oleh 1 program dan 17 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Perhubungan

sebesar Rp53.322.437.700,- dan realisasi sebesar Rp44.471.479.749,- atau sebesar 83,40% dengan realisasi fisik sebesar 96,90%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian.**

Program ini melaksanakan 17 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan, (2)Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, (3)Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang pada UPT Serang, (4)Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang pada UPT Tangerang, (5)Kegiatan Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan, (6)Kegiatan Penyelenggaraan Perhubungan Udara, (7)Kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan, (8)Kegiatan Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut, (9)Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api, (10)Kegiatan Penyelenggaraan Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi, (11)Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang, (12)Kegiatan Penataan dan Peningkatan Pelayanan Perhubungan pada UPT Serang, (13)Kegiatan Penataan dan Peningkatan Pelayanan Perhubungan pada UPT Tangerang, (14)Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang Pada UPT Tangerang Selatan, (15)Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang Pada UPT Lebak-Pandeglang, (16)Kegiatan Penataan dan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Pada UPT Tangerang Selatan, dan (17)Kegiatan Penataan dan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Pada UPT Lebak-Pandeglang. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 96,90% dan realisasi keuangan sebesar 83,40%.

Permasalahan dan Solusi

a). Permasalahan

b). Solusi

4.1.8 Urusan Wajib Lingkungan Hidup.

Pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup didukung oleh 2 program dan 13 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Badan Lingkungan Hidup Daerah** dan **Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup sebesar Rp18.512.178.000,- dan realisasi sebesar Rp16.935.657.418,- atau sebesar 91,48% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh **Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten** dengan melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, (2)Kegiatan Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3, (3)Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, (4)Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, (5)Kegiatan Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, (6)Kegiatan Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan, (7)Kegiatan Pengujian dan Analisis Lab untuk Seluruh Komponen Lingkungan, dan (8)Kegiatan Peningkatan Jaminan Mutu Lab Lingkungan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 90,94%.

2. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang terbagi atas 5 kegiatan, antara lain: **Badan Lingkungan Hidup Daerah** melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam, dan (2)Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air, dengan realisasi Fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,14%, dan **Dinas Kehutanan dan Perkebunan** melaksanakan 3 kegiatan,

yaitu: (1)Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, (2)Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi Tahura Banten, dan (3)Kegiatan Pengembangan Tahura Banten (DAK), dengan realisasi Fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,69%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,48%.

4.1.9 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pada Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Biro Pemerintahan Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp1.295.556.000,- dan realisasi sebesar Rp1.114.648.290,- atau sebesar 86,04% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Penataan Administrasi Kependudukan**.

Program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan dan Penataan Kependudukan, dan (2)Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 86,04%.

4.1.10 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh 1 program dan 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp10.350.000.000,- dan realisasi sebesar Rp9.897.118.400,- atau sebesar 95,62% dengan realisasi fisik sebesar 99,50%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**.

Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, (2)Kegiatan

Penguatan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Dunia Usaha, (3)Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak, (4)Kegiatan Penguatan Organisasi Perempuan, (5)Kegiatan Penguatan Jaringan Kerja Pengarusutamaan Gender, (6)Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), (7)Kegiatan Koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, dan (8)Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,50% dan realisasi keuangan sebesar 95,62%.

4.1.11 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pada Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera didukung oleh 1 program yang dilaksanakan oleh **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp488.990.000,- atau sebesar 97,80% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Kependudukan dan Keluarga Berencana**.

Program ini melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Program Keluarga Berencana. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,80%.

4.1.12 Urusan Wajib Sosial.

Pada Urusan Wajib Sosial didukung oleh 4 program dan 19 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, Dinas Sosial, dan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Sosial sebesar Rp79.127.909.900,- dan realisasi sebesar Rp76.055.856.420,- atau sebesar 96,12% dengan realisasi fisik sebesar 99,97%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin.

Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, dan Dinas Sosial Provinsi Banten yang terbagi atas 4 kegiatan, yaitu: **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa** melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Penguatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,57%, dan **Dinas Sosial** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Sosial Fakir Miskin, (2)Kegiatan Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan, dan (3)Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Sosial Komunitas Masyarakat Terpencil, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,16%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,05%.

2. Program Rehabilitasi Sosial.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh **Dinas Sosial Provinsi Banten** dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia, (2)Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Eks Napza, (3)Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Orang dengan Kecacatan dan Eks Penyakit Kronis, (4)Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial pada Balai Perlindungan Sosial, (5)Kegiatan Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran pada Balai Perlindungan Sosial, (6)Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S), dan (7)Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,86% dan realisasi keuangan sebesar 97,90%.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh **Dinas Sosial Provinsi Banten** dengan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Perlindungan Sosial KTK dan Pekerja Migran

Bermasalah, (2)Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana, dan (3)Kegiatan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,19%.

4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, dan Dinas Sosial yang terbagi atas 5 kegiatan, yaitu: **Biro Kesejahteraan Rakyat** melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kehidupan Keagamaan, dan (2)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pembinaan Lembaga Keagamaan, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,72%, dan **Dinas Sosial** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Kualitas Potensi dan Sumber Kesos Masyarakat, (2)Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3), dan (3)Kegiatan Promosi, Publikasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,42%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,05%.

Permasalahan dan Solusi

a). Permasalahan

b). Solusi

4.1.13 Urusan Wajib Ketenagakerjaan.

Pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan didukung oleh 3 program dan 14 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan sebesar Rp31.917.162.800,- dan realisasi sebesar Rp28.270.307.707,- atau sebesar 88,57% dengan realisasi fisik sebesar 97,91%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Pelaksanaan program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, (2)Kegiatan Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), (3)Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja, (5)Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Penetapan UMP, (6)Kegiatan Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, dan (7)Kegiatan Fasilitasi Pengawas Ketenagakerjaan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,64% dan realisasi keuangan sebesar 93,04%.

2. Program Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha.

Program ini melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pelatihan Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan Tenaga Daerah, (2)Kegiatan Pelatihan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri, (3)Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, (4)Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan, dan (5)Kegiatan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 96,14% dan realisasi keuangan sebesar 88,28%.

3. Program Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja.

Program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Provinsi Banten, dan (2)Kegiatan Sosialisasi Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan Penempatan Hasil Pelatihan BLKI. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,95% dan realisasi keuangan sebesar 84,31%.

4.1.14 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh 3 program dan 10 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp21.977.740.700,- dan realisasi sebesar Rp20.322.357.600,- atau sebesar 92,47% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM.

Pelaksanaan program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Kredit bagi K-UMKM, (2)Kegiatan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Industri Hasil Pertanian, (3)Kegiatan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Aneka Usaha, dan (4)Kegiatan Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,54%.

2. Program Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM.

Pelaksanaan program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengembangan Wirausaha Baru Melalui Inkubator Teknologi Bisnis, (2)Kegiatan Dukungan Promosi dan Pemasaran Produk serta Peningkatan Kapasitas Kerjasama dan Jaringan Usaha, dan (3)Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pengembangan Teknologi, Pasar dan Pemasaran Produk Unggulan K-UMKM. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 82,14%.

3. Program Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM.

Pelaksanaan program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi, (2)Kegiatan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi, dan

(3)Kegiatan Pelatihan Bagi Pengurus Koperasi dan UMKM. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,63%.

4.1.15 Urusan Wajib Penanaman Modal.

Pada Urusan Wajib Penanaman Modal didukung oleh 2 program dan 5 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Penanaman Modal sebesar Rp11.314.936.000,- dan realisasi sebesar Rp9.109.362.386,- atau sebesar 80,51% dengan realisasi fisik sebesar 93,17%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Peningkatan Iklim Investasi.

Pelaksanaan program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, (2)Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan (3)Kegiatan Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman Modal. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 86,33% dan realisasi keuangan sebesar 83,79%.

2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Pelaksanaan program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal, dan (2)Kegiatan Kerjasama Investasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 79,16%.

4.1.16 Urusan Wajib Kebudayaan.

Pada Urusan Wajib Kebudayaan didukung oleh 1 program dan 5 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Kebudayaan sebesar Rp11.618.669.000,- dan realisasi sebesar Rp8.820.388.047,- atau sebesar 75,92% dengan realisasi fisik sebesar 91,80%, pelaksanaan program dimaksud

adalah **Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya.**

Program ini melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah, (2)Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran Seni, (3)Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah, (4)Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesenian, dan (5)Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan Kesenian. Realisasi fisik kegiatan kumulatif pada program dimaksud sebesar 91,80% dan realisasi keuangan sebesar 75,92%.

4.1.17 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga.

Pada Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga didukung oleh 2 program dan 18 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten.** Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp36.111.676.100,- dan realisasi sebesar Rp33.931.161.760,- atau sebesar 93,96% dengan realisasi fisik sebesar 99,17%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Kepemudaan dan Kepramukaan

Pelaksanaan program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan, (2)Kegiatan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, (3)Kegiatan Pembinaan Kepramukaan, (4)Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda, (5)Kegiatan Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda, (6)Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kepemudaan, dan (7)Kegiatan Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,26%.

2. Program Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga

Pelaksanaan program ini melaksanakan 11 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan

Penyelenggara Kejuaraan Olahraga, (2)Kegiatan Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus, (3)Kegiatan Pelayanan dan Pengawasan Organisasi keolahragaan, (4)Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, (5)Kegiatan Peningkatan SDM Keolahragaan, (6)Kegiatan Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga, (7)Kegiatan Fasilitasi Prasarana dan Sarana olahraga, (8)Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015, (9)Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar, (10)Kegiatan Pembinaan Marching Band Gita Suroswan, dan (11)Kegiatan Penyusunan dan Rencana Pengelolaan Sekolah Khusus Olahraga (SKO). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,34% dan realisasi keuangan sebesar 93,57%.

Permasalahan dan Solusi

a). Permasalahan

b). Solusi

4.1.18 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pada Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri didukung oleh 1 program dan 9 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebesar Rp21.892.037.000,- dan realisasi sebesar Rp20.177.701.798,- atau sebesar 92,17% dengan realisasi fisik sebesar 99,42%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik**.

Program ini melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Budaya Politik Masyarakat di Provinsi Banten, (2)Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Politik, (3)Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, (4)Kegiatan Peningkatan Pembauran Kerukunan dan Kewarganegaraan, (5)Kegiatan Peningkatan Pemahaman Ideologi

dan Wawasan Kebangsaan, (6)Kegiatan Fasilitas Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik, (7)Kegiatan Fasilitas Penanganan Masalah Perbatasan dan Orang Asing, (8)Kegiatan Fasilitas Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi, dan (9)Kegiatan Fasilitas Pemilikada Serentak. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,42% dan realisasi keuangan sebesar 92,17%.

4.1.19 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Pada Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian didukung oleh 14 program dan 596 kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh **Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Banten (42 SKPD)**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebesar Rp1.206.068.320.789,- dan realisasi sebesar Rp976.692.993.702,- atau sebesar 80,98% dengan realisasi fisik sebesar 93,48%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum.

Pada pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, dan Kantor Penghubung Provinsi Banten yang terbagi atas 44 kegiatan, antara lain: **Biro Pemerintahan** melaksanakan 9 Kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, (2)Kegiatan Fasilitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan, (3)Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (4)Kegiatan Fasilitas Penegasan Batas Daerah, (5)Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten,

(6)Kegiatan Penataan Daerah Otonom, (7)Kegiatan Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, (8)Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan, dan (9)Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada, dengan realisasi fisik sebesar 94,20% dan realisasi keuangan sebesar 81,99%, **Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan** melaksanakan 10 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa (SHSBJ) dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan, (2)Kegiatan Fasilitas Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UMKM, (3)Kegiatan Fasilitas Penataan Kebijakan di Bidang Kelembagaan Keuangan Daerah, (4)Kegiatan Fasilitas Penataan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Perekonomian, (5)Kegiatan Fasilitas Penataan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar, (6)Kegiatan Fasilitas Penataan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi, (7)Kegiatan Fasilitas Penataan Kebijakan di Bidang Kerjasama Perekonomian Investasi dan Industri, (8)Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan LPSE Provinsi Banten, (9)Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan ULP Provinsi Banten, dan (10)Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,91%, **Biro Kesejahteraan Rakyat** melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Masalah Sosial, (2)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Nilai-nilai Kejuangan, (3)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, (4)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Penguatan Lembaga Sosial, (5)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan (6)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Keluarga Berencana, (7)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Bantuan Masyarakat

dan Transmigrasi, dan (8)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 85,66%, **Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol** melaksanakan 11 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Hubungan dan Kerjasama Pers, (2)Kegiatan Sarana Komunikasi, (3) Kegiatan Liputan dan Pengelolaan Dokumen, (4)Kegiatan Pengembangan Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, (5)Kegiatan Penerbitan Media dan Teknologi Informasi, (6)Kegiatan Aspirasi dan Pengelolaan Opini Publik, (7)Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi Publik, (8)Kegiatan Optimalisasi Tata Acara Keprotokolan, (9)Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pimpinan, (10)Kegiatan Pelayanan Tamu, dan (11)Kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,96%, dan **Kantor Penghubung** melaksanakan 6 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengelolaan Wisma, (2)Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah, (3)Kegiatan Fasilitasi Pejabat Pemda dan Tamu, (4)Kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Banten, (5)Kegiatan Fasilitasi Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah, dan (6)Kegiatan Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan di TMII, dengan realisasi fisik sebesar 88,57% dan realisasi keuangan sebesar 90,46%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 96,55% dan realisasi keuangan sebesar 91,06%.

2. Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh **Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten** dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Fasilitasi Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, (2)Kegiatan Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum, (3)Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten,

(4)Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan, (5)Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Penguatan Potensi Anggota Satuan Linmas, (6)Kegiatan Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, (7)Kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Teknis Fungsional Satpol PP Provinsi Banten, (8)Kegiatan Pemantapan Tugas Anggota Satpol PP, dan (9)Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Mediasi dan Komunikasi Pendayagunaan Satuan Linmas. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,36% dan realisasi keuangan sebesar 96,75%.

3. Program Penanggulangan Bencana.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten** dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana, (2)Kegiatan Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana, (3)Kegiatan Penanganan Kedaruratan Bencana, (4)Kegiatan Fasilitasi Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan, (5)Kegiatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana, (6)Kegiatan Pemulihan Kondisi Sarana Prasarana Lokasi Pasca Bencana, dan (7)Kegiatan PUSDALOPS PB. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,81% dan realisasi keuangan sebesar 86,09%.

4. Program Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh **Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi Banten** dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penatausahaan Aset Daerah, (2)Kegiatan Pemanfaatan dan Investasi Kekayaan Daerah, (3)Kegiatan Penyelesaian TPTGR dan Penghapusan Barang Daerah, (4)Kegiatan Pendistribusian dan Pemanfaatan Aset Daerah, (5)Kegiatan Perencanaan Program dan Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Provinsi Banten, dan (7)Kegiatan Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana

Pemerintah Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 73,36% dan realisasi keuangan sebesar 52,40%.

5. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten** dengan melaksanakan 32 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah, (2)Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah, (3)Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Retribusi, (4)Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Balaraja, (5)Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cikande, (6)Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cikokol, (7)Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Ciledug, (8)Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cilegon, (9)Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Ciputat, (10)Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Malingping, (11)Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Pandeglang, (12)Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Rangkasbitung, (13)Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Serang, (14)Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Serpong, (15)Kegiatan Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota, (16)Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA 2015, (17)Kegiatan Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah, (18)Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2014 dan Interim Tahun 2015 Provinsi Banten, (19)Kegiatan Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA, (20)Kegiatan Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah, (21)Kegiatan Penatausahaan Kas Daerah, (22)Kegiatan Penyusunan Pedoman Anggaran, (23)Kegiatan Penyusunan Raperda Perubahan APBD 2015 dan APBD 2016, (24)Kegiatan

Penyusunan Rapergub Penjabaran APBD, Verifikasi Dokumen Pelaksanaan dan Pergeseran Anggaran, (25)Kegiatan Evaluasi Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten dan Raper KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten TA. 2014, (26)Kegiatan Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Raper KDH Perubahan APBD TA 2015 dan APBD TA 2016, (27)Kegiatan Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah, (28)Kegiatan Pembinaan Pengendalian Keuangan Daerah, (29)Kegiatan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan, (30)Kegiatan Pemeliharaan Standarisasi Mutu Pelayanan, (31)Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan (32)Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 84,52% dan realisasi keuangan sebesar 84,52%.

6. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh **Biro Organisasi Provinsi Banten** dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, (2)Kegiatan Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah dan Pembinaan dan Fasilitasi Raperda/Perda Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota, (3)Kegiatan Penyusunan Kebijakan Ketatalaksanaan, (4)Kegiatan Penyusunan Uraian Tugas, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah, (5)Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial PNS, (6)Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan (7)Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 88,35% dan realisasi keuangan sebesar 88,85%.

7. Program Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh **Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten** dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penanganan Kasus Disiplin PNS Provinsi Banten, (2)Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan Pembinaan Mental Pegawai, (3)Kegiatan Penataan, Penempatan Kerja Pegawai dan Fasilitasi Persiapan PNS Masa Purna Tugas, (4)Kegiatan Fasilitasi Kepangkatan dan Penggajian, (5)Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional dan Sidang Baperjakat, (6)Kegiatan Peningkatan Kompetensi PNS Provinsi Banten, (7)Kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), (8)Kegiatan Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian, dan (9)Kegiatan Peningkatan Manajemen Penatausahaan Kepegawaian. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 89,31% dan realisasi keuangan sebesar 72,49%.

8. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh **Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten** dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengembangan Program dan Kerjasama Kelembagaan, (2)Kegiatan Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Aparatur, (3)Kegiatan Diklat Kapabilitas Kepemimpinan Bagi Kepala Desa Se-Provinsi Banten, (4)Kegiatan Diklat Struktural Bagi PNS Daerah, (5)Kegiatan Diklat Teknis Penatausahaan Program, (6)Kegiatan Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja, (7)Kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur, (8)Kegiatan Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah Daerah, dan (9)Kegiatan Diklat Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Se-Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,57% dan realisasi keuangan sebesar 89,86%.

9. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh seluruh **Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (42 SKPD)** yang terbagi atas 89 kegiatan. Pada 42 SKPD terdapat 35 SKPD masing-masing melaksanakan 2 kegiatan dengan nama kegiatan yang sama, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, dan (2)Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Dari 35 SKPD masing-masing untuk realisasi fisik dan realisasi keuangan terhadap Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: **Dinas Pendidikan** realisasi fisik sebesar 88,03% dan realisasi keuangan sebesar 84,05%, **Dinas Kesehatan** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,17%, **Dinas SDA dan Permukiman** realisasi fisik sebesar 94,74% dan realisasi keuangan sebesar 96,35%, **Dinas Bina Marga dan Tata Ruang** realisasi fisik sebesar 88,37% dan realisasi keuangan sebesar 86,52%, **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** realisasi fisik sebesar 99,25% dan realisasi keuangan sebesar 86,77%, **Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 89,80%, **Badan Lingkungan Hidup Daerah** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,30%, **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,48%, **Dinas Sosial** realisasi fisik sebesar 94,41% dan realisasi keuangan sebesar 94,16%, **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 74,70%, **Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,02%, **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata** realisasi fisik sebesar 92,30% dan realisasi keuangan sebesar 80,58%, **Dinas Pemuda dan Olahraga** realisasi fisik sebesar

99,31% dan realisasi keuangan sebesar 83,79%, **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,92%, **Biro Pemerintahan** realisasi fisik sebesar 107,03% dan realisasi keuangan sebesar 76,90%, **Biro Hukum** realisasi fisik sebesar 99,37% dan realisasi keuangan sebesar 91,46%, **Biro Organisasi** realisasi fisik sebesar 96,97% dan realisasi keuangan sebesar 97,17%, **Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,77%, **Biro Kesejahteraan Rakyat** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 68,43%, **Biro Perlengkapan dan Aset Daerah** realisasi fisik sebesar 98,36% dan realisasi keuangan sebesar 95,95%, **Biro Humas dan Protokol** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,11%, **Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah** realisasi fisik sebesar 81,59% dan realisasi keuangan sebesar 79,69%, **Kantor Inspektorat** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,24%, **Badan Kepegawaian Daerah** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,43%, **Badan Pendidikan dan Pelatihan** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,50%, **Satuan Polisi Pamong Praja** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,41%, **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** realisasi fisik sebesar 97,46% dan realisasi keuangan sebesar 87,42%, **Kantor Penghubung** realisasi fisik sebesar 82,56% dan realisasi keuangan sebesar 84,19%, **Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,24%, **Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah** realisasi fisik sebesar 98,99% dan realisasi keuangan sebesar 99,34%, **Dinas Pertanian dan Peternakan** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 87,82%, **Dinas Kehutanan dan Perkebunan** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 86,79%, **Dinas Pertambangan dan Energi** realisasi fisik sebesar 100% dan

realisasi keuangan sebesar 94,88%, **Dinas Kelautan dan Perikanan** realisasi fisik sebesar 86,33% dan realisasi keuangan sebesar 70,21%, **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,50%.

Adapun SKPD yang melaksanakan 1 kegiatan adalah **RSUD Malingping**. Kegiatan yang dimaksud adalah Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dengan realisasi fisik sebesar 99,36% dan realisasi keuangan sebesar 91,01%, sedangkan 6 SKPD lainnya melaksanakan kegiatan yang terbagi atas 18 kegiatan, antara lain: **RSUD Banten** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, (2)Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan (3)Kegiatan Perbendaharaan dan Verifikasi, dengan realisasi fisik sebesar 95,47% dan realisasi keuangan sebesar 81,72%, **Dinas Koperasi dan UMKM** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, (2)Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan (3)Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Balatkop, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,88%, **Sekretariat DPRD** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, (2)Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan (3)Kegiatan Pengelolaan Verifikasi dan Pembukuan Keuangan, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,53%, **Biro Umum** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, (2)Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan (3)Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi, dengan realisasi fisik sebesar 75,08% dan realisasi keuangan sebesar 77,02%, **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, (2)Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan (3)Kegiatan Fasilitas

Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,26%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 97,04% dan realisasi keuangan sebesar 88,93%, dan **Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, (2)Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan (3)Kegiatan Perencanaan UPTB Cadangan Pangan, dengan realisasi fisik sebesar 98,73% dan realisasi keuangan sebesar 85,92%.

10. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh 37 SKPD dilingkungan Provinsi Banten, dan terbagi atas 348 kegiatan, antara lain: **Biro Organisasi** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Setda, (2)Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai, dan (3)Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Budaya Kerja Aparatur, dengan realisasi fisik sebesar 93,24% dan realisasi keuangan sebesar 93,47%, **Biro Umum** melaksanakan 14 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (2)Kegiatan Koordinasi Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah, (3)Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten, (4)Kegiatan Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda Provinsi Banten, (5)Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanditel, (6)Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pimpinan Daerah, (7)Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pimpinan Sekretariat Daerah, (8)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Gubernur Banten, (9)Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan Setda Provinsi Banten, (10)Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Dinas Pada Setda Provinsi Banten, (11)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Lingkungan Setda Provinsi Banten, (12)Kegiatan Penyelenggaraan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

(13)Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Pimpinan Daerah, dan (14)Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Pembayaran gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di lingkungan Setda, dengan realisasi fisik sebesar 79,70% dan realisasi keuangan sebesar 79,66%, **Biro Perlengkapan dan Aset** melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, dan (2)Kegiatan Penyediaan Penunjang Ketatausahaan, dengan realisasi fisik sebesar 92,31% dan realisasi keuangan sebesar 80,38%, **Sekretariat DPRD** melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dan (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 88,18%, **Kantor Inspektorat** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 95,00% dan realisasi keuangan sebesar 86,13%, **Satuan Polisi Pamong Praja** melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dan (4)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,66%, **Dinas Kesehatan** melaksanakan 11 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai

Kesehatan Kerja Masyarakat, (7)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, (8)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, (9)Kegiatan Penyediaan barang dan jasa perkantoran pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, (10)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, dan (11)Kegiatan Penyediaan Barang dan pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 98,59% dan realisasi keuangan sebesar 91,85%, **Dinas Pendidikan** melaksanakan 21 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada BPPNF, (6)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai Teknologi dan Informasi, (7)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, (8)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus, (9)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai pada Pendidikan Non Formal, (10)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Teknologi dan Informasi, (11)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus, (12)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pendidikan Non Formal, (13)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tekhnologi dan Informasi, (14)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus, (15)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pendidikan Non Formal, (16)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Teknologi dan Informasi, (17)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada SMAN CMBBS, (18)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada SMAN CMBBS, (19)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada SMAN CMBBS,

(20)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus, dan (21)Kegiatan Penataan Aset dan Arsip Dinas Pendidikan Provinsi Banten, dengan realisasi fisik sebesar 84,19% dan realisasi keuangan sebesar 76,49%, **Dinas Pemuda dan Olahraga** melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga, (7)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga, (8)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga, dan (9)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga, dengan realisasi fisik sebesar 99,78% dan realisasi keuangan sebesar 89,02%, **Dinas Pertanian dan Peternakan** melaksanakan 25 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, (7)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, (8)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Peternakan, (9)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura, (10)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, (11)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan

dan Hortikultura, (12)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, (13)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Peternakan, (14)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura, (15)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, (16)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, (17)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, (18)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pengembangan Peternakan, (19)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura, (20)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, (21)Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi /Renovasi UPTD Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukung (DAK), (22)Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Renovasi UPTD Balai Sertifikasi Tanaman Pangan Hortikultura dan Sarana Pendukungnya (DAK), (23)Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/Renovasi UPTD Balai Perbibitan Peternakan dan Penyediaan Sarana Pendukung (DAK), (24)Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Laboratorium Keswan (DAK), dan (25)Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Laboratorium Pakan (DAK), dengan realisasi fisik sebesar 96,32% dan realisasi keuangan sebesar 88,52%, **Dinas Kelautan dan Perikanan** melaksanakan 17 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian Mutu Hasil

Perikanan, (7)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar, (8)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Pantai, (9)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelabuhan Perikanan Pantai, (10)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan, (11)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar, (12)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Pantai, (13)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelabuhan Perikanan Pantai, (14)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan, (15)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar, (16)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Budidaya Ikan Pantai, dan (17)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelabuhan Perikanan Pantai, dengan realisasi fisik sebesar 99,74% dan realisasi keuangan sebesar 89,53%, **Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman** melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman – Cisawarna, (7)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Ciujung – Cidanau, (8)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung – Cidanau, dan (9)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian – Cisdane, dengan realisasi fisik sebesar 94,04% dan realisasi keuangan sebesar 77,60%,

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang melaksanakan 22 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6)Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi, (7)Kegiatan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, (8)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang, (9)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon, (10)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi, (11)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang, (12)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon, (13)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi, (14)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang, (15)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon, (16)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi, (17)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang, (18)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak, (19)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang, (20)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak, (21)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan

Jembatan Wilayah Pandeglang, dan (22)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak, dengan realisasi fisik sebesar 91,38% dan realisasi keuangan sebesar 90,98%, **Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah** melaksanakan 39 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6)Kegiatan Penataan Arsip di DPPKD Provinsi Banten, (7)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Balaraja, (8)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Balaraja, (9)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Balaraja, (10)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikande, (11)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikande, (12)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Cikande, (13)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikokol, (14)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikokol, (15)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Cikokol, (16)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciledug, (17)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciledug, (18)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Ciledug, (19)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cilegon, (20)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cilegon, (21)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Cilegon, (22)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciputat, (23)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciputat, (24)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD

Ciputat, (25)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Malingping, (26)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Malingping, (27)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Malingping, (28)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Pandeglang, (29)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Pandeglang, (30)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Pandeglang, (31)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Rangkasbitung, (32)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Rangkasbitung, (33)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Rangkasbitung, (34)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serang, (35)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serang, (36)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Serang, (37)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serpong, (38)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serpong, dan (39)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Serpong, dengan realisasi fisik sebesar 88,60% dan realisasi keuangan sebesar 85,21%.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan 15 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan, (7)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan, (8)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tahura, (9)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada

Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan, (10)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan, (11)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tahura, (12)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan, (13)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan, (14)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Tahura, dan (15)Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan Penyediaan Sarana Pendukung (DAK), dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,20%. **Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika** melaksanakan 15 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Serang, (7)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang, (8)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Serang, (9)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang, (10)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Serang, (11)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Tangerang, (12)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang Selatan, (13)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Lebak-Pandeglang, (14)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Lebak-Pandeglang, dan (15)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Tangerang Selatan, dengan realisasi fisik sebesar 97,23% dan realisasi keuangan sebesar 87,39%. **Dinas**

Pertambangan dan Energi melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 80,89%. **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** melaksanakan 11 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi, (7)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri, (8)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi, (9)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri, (10)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi, dan (11)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri, dengan realisasi fisik sebesar 97,62% dan realisasi keuangan sebesar 91,35%. **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata** melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten, (7)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten, (8)Kegiatan Penyediaan

Barang dan Jasa pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten, dan (9)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten, dengan realisasi fisik sebesar 90,67% dan realisasi keuangan sebesar 87,92%. **Dinas Sosial** melaksanakan 13 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perlindungan Sosial, (7)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial, (8)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perlindungan Sosial, (9)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial, (10)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Perlindungan Sosial, (11)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial, (12)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Perlindungan Sosial, dan (13)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial, dengan realisasi fisik sebesar 99,45% dan realisasi keuangan sebesar 97,39%. **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Latihan Kerja Industri, (7)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Latihan Kerja Industri, dan (8)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Latihan Kerja Industri,

dengan realisasi fisik sebesar 98,03% dan realisasi keuangan sebesar 80,37%. **Dinas Koperasi dan UMKM** melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balatkop, (7)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balatkop, dan (8)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balatkop, dengan realisasi fisik sebesar 99,38% dan realisasi keuangan sebesar 91,62%. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** melaksanakan 6 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dan (6)Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan, dengan realisasi fisik sebesar 99,21% dan realisasi keuangan sebesar 91,27%. **Badan Lingkungan Hidup Daerah** melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Lab, (7)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Lab, (8)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada UPT Lab, dan (9)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPT Lab, dengan realisasi fisik sebesar 88,03% dan realisasi keuangan sebesar 69,82%. **Badan Kepegawaian Daerah** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor,

(2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 99,00% dan realisasi keuangan sebesar 82,99%. **Badan Pendidikan dan Pelatihan** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 98,88% dan realisasi keuangan sebesar 94,27%. **Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 96,49% dan realisasi keuangan sebesar 95,84%. **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 90,85%. **Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 92,27% dan realisasi keuangan sebesar 80,48%. **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**

melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dan (4)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, **dengan realisasi fisik sebesar 28,83% dan realisasi keuangan sebesar 36,35%.** **Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 92,00% dan realisasi keuangan sebesar 93,40%. **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, **dengan realisasi fisik sebesar 37,12% dan realisasi keuangan sebesar 37,44%.** **Kantor Penghubung** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, **dengan realisasi fisik sebesar 49,95% dan realisasi keuangan sebesar 39,36%.** **RSUD Malingping** melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dan (4)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, **dengan realisasi fisik sebesar 25,38% dan realisasi keuangan sebesar 32,09%.** **Sekretariat Komisi Penyiaran**

Indonesia Daerah melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, **dengan realisasi fisik sebesar 45,00% dan realisasi keuangan sebesar 52,27%.** **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 76,88%. **Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten** melaksanakan 6 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dan (6)Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia RSUD Banten, **dengan realisasi fisik sebesar 7,38% dan realisasi keuangan sebesar 15,00%.** Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,34% dan realisasi keuangan sebesar 82,20%.

11. Program Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh **Kantor Inspektorat Provinsi Banten** melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, (2)Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, (3)Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan, (4)Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan yang Lebih Komprehensif, (5)Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, (6)Kegiatan Penanganan Kasus-Kasus

Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah, (7)Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH, dan (8)Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 97,56% dan realisasi keuangan sebesar 93,25%.

12. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh **Sekretariat DPRD Provinsi Banten** dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Fasilitasi Pengkajian Produk Hukum, (2)Kegiatan Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten, (3)Kegiatan Pelayanan Informasi Hukum dan Perpustakaan DPRD Provinsi Banten, (4)Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten, (5)Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Alat Kelengkapan DPRD, (6)Kegiatan Fasilitasi Risalah DPRD Provinsi Banten, (7)Kegiatan Fasilitasi Protokol DPRD Provinsi Banten, (8)Kegiatan Fasilitasi Informasi dan Publikasi DPRD Provinsi Banten, dan (9)Kegiatan Fasilitasi Aspirasi Masyarakat. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 93,83% dan realisasi keuangan sebesar 73,02%.

13. Program Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh **Biro Hukum Provinsi Banten** dengan melaksanakan 10 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, (2)Kegiatan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten, (3)Kegiatan Penyusunan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Banten, (4)Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah I, (5)Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah II, (6)Kegiatan Penyusunan Kajian Produk Hukum dan Penyusunan MoU/Perjanjian, (7)Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum, (8)Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hukum dan HAM, (9)Kegiatan

Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat/Kadarkum, dan (10)Kegiatan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 97,11% dan realisasi keuangan sebesar 92,45%.

14. Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis Daerah dan IPTEK.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten** dengan melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, (2)Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM, (3)Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian Bidang Sosial Budaya, (4)Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan, (5)Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna, (6)Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan, (7)Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan, dan (8)Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,70%.

4.1.20 Urusan Wajib Ketahanan Pangan.

Pada Urusan Wajib Ketahanan Pangan didukung oleh 1 program dan 10 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Ketahanan Pangan sebesar Rp13.060.210.000,- dan realisasi sebesar Rp11.227.222.573,- atau sebesar 85,97% dengan realisasi fisik sebesar 92,93%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Ketahanan Pangan Masyarakat.**

Program ini melaksanakan 10 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengelolaan dan Penanganan Kerawanan Pangan, (2)Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Ketersediaan dan Akses Pangan,

(3)Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan, (4)Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan, (5)Kegiatan Pengendalian Program Bantuan Raskin, (6)Kegiatan Pembinaan, Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Pangan, (7)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, (8)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten, (9)Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Cadangan Pangan Pemerintah, dan (10)Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,93% dan realisasi keuangan sebesar 85,97%.

4.1.21 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh 1 Program yang dilaksanakan oleh **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp7.428.000.000,- dan realisasi sebesar Rp6.537.746.890,- atau sebesar 88,01% dengan realisasi fisik sebesar 94,67%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan**.

Program ini melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), (2)Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat, (3)Kegiatan Penumbuhkembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Perkembangan Desa/Kelurahan, dan (5)Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan Desa. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,67% dan realisasi keuangan sebesar 88,01%.

4.1.22 Urusan Wajib Statistik.

Pada Urusan Wajib Statistik didukung oleh 1 program dan 42 kegiatan yang dilaksanakan seluruh **Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Banten (42 SKPD)**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Statistik sebesar Rp27.860.760.013,- dan realisasi sebesar Rp25.512.296.738,- atau sebesar 91,57% dengan realisasi fisik sebesar 96,60%, pelaksanaan program dimaksud adalah yaitu: Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan program dimaksud terbagi atas 42 kegiatan dengan nama kegiatan yang sama, yaitu: Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan. Adapun realisasi yang dicapai pada masing-masing SKPD dilingkungan Provinsi Banten, adalah: **Biro Pemerintahan** dengan realisasi fisik sebesar 23,81% dan realisasi keuangan sebesar 15,87%, **Biro Hukum** dengan realisasi fisik sebesar 42,50% dan realisasi keuangan sebesar 23,17%, **Biro Organisasi** dengan realisasi fisik sebesar 14,33% dan realisasi keuangan sebesar 17,57%, **Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan** dengan realisasi fisik sebesar 28,59% dan realisasi keuangan sebesar 9,15%, **Biro Kesejahteraan Rakyat** dengan realisasi fisik sebesar 10,37% dan realisasi keuangan sebesar 21,89%, **Biro Umum** dengan realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%, **Biro Perlengkapan dan Aset Daerah** dengan realisasi fisik sebesar 97,28% dan realisasi keuangan sebesar 90,80%, **Biro Humas dan Protokol** dengan realisasi fisik sebesar 28,53% dan realisasi keuangan sebesar 46,33%, **Sekretariat DPRD** dengan realisasi fisik sebesar 37,31% dan realisasi keuangan sebesar 32,78%, **Kantor Inspektorat** dengan realisasi fisik sebesar 24,02% dan realisasi keuangan sebesar 20,22%, **Satuan Polisi Pamong Praja** dengan realisasi fisik sebesar 24,67% dan realisasi keuangan sebesar 21,80%, **Dinas Kesehatan** dengan realisasi fisik sebesar 14,60% dan realisasi keuangan sebesar 19,74%, **Dinas Pendidikan** dengan realisasi fisik sebesar 24,66% dan realisasi keuangan sebesar 19,32%, **Dinas Pemuda dan Olahraga** dengan realisasi fisik

sebesar 8,92% dan realisasi keuangan sebesar 10,38%, **Dinas Pertanian dan Peternakan** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,16%, **Dinas Kelautan dan Perikanan** dengan realisasi fisik sebesar 18,75% dan realisasi keuangan sebesar 16,39%, **Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman** dengan realisasi fisik sebesar 52,77% dan realisasi keuangan sebesar 44,65%, **Dinas Bina Marga dan Tata Ruang** dengan realisasi fisik sebesar 28,70% dan realisasi keuangan sebesar 11,85%, **Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%, **Dinas Kehutanan dan Perkebunan** dengan realisasi fisik sebesar 87,80% dan realisasi keuangan sebesar 87,80%, **Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi** dengan realisasi fisik sebesar 31,24% dan realisasi keuangan sebesar 20,84%, **Dinas Pertambangan dan Energi** dengan realisasi fisik sebesar 81,58% dan realisasi keuangan sebesar 63,44%, **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** dengan realisasi fisik sebesar 12,58% dan realisasi keuangan sebesar 0,82%, **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,65%, **Dinas Sosial** dengan realisasi fisik sebesar 16,81% dan realisasi keuangan sebesar 11,03%, **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** dengan realisasi fisik sebesar 27,96% dan realisasi keuangan sebesar 28,23%, **Dinas Koperasi dan UMKM** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,48%, **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan realisasi fisik sebesar 23,04% dan realisasi keuangan sebesar 17,99%, **Badan Lingkungan Hidup Daerah** dengan realisasi fisik sebesar 50,00% dan realisasi keuangan sebesar 36,42%, **Badan Kepegawaian Daerah** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,82%, **Badan Pendidikan dan Pelatihan** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 81,58%, **Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah** dengan realisasi fisik sebesar 99,34% dan realisasi keuangan sebesar 99,34%, **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

dengan realisasi fisik sebesar 97,64% dan realisasi keuangan sebesar 96,99%, **Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan** dengan realisasi fisik sebesar 98,86% dan realisasi keuangan sebesar 84,01%, **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah** dengan realisasi fisik sebesar 2,62% dan realisasi keuangan sebesar 2,73%, **Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,19%, **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa** dengan realisasi fisik sebesar 32,28% dan realisasi keuangan sebesar 32,69%, **Kantor Penghubung** dengan realisasi fisik sebesar 5,29% dan realisasi keuangan sebesar 7,28%, **RSUD Malingping** dengan realisasi fisik sebesar 8,85% dan realisasi keuangan sebesar 10,29%, **Sekretariat Komisi Penyiaran Informasi Daerah** dengan realisasi fisik sebesar 11,38% dan realisasi keuangan sebesar 9,28%, **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,95%, dan **RSUD Banten** dengan realisasi fisik sebesar 18,67% dan realisasi keuangan sebesar 16,86%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 96,60% dan realisasi keuangan sebesar 91,57%.

4.1.23 Urusan Wajib Kearsipan.

Pada Urusan Wajib Kearsipan didukung oleh 1 program dan 4 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Kearsipan sebesar Rp8.283.291.900,- dan realisasi sebesar Rp7.239.499.604,- atau sebesar 87,40% dengan realisasi fisik sebesar 86,28%, pelaksanaan program dimaksud adalah yaitu **Program Pembinaan Kearsipan Daerah**.

Program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penataan, Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip Daerah, (2)Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kearsipan Provinsi Banten (SIKP), (3)Kegiatan Pembinaan Aparatur Pengelola Kearsipan Daerah Provinsi Banten, dan (4)Kegiatan Pengembangan Sistem

Administrasi Kearsipan Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 86,28% dan realisasi keuangan sebesar 87,40%.

4.1.24 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika.

Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika didukung oleh 1 program dan 6 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**, dan **Sekretariat Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika sebesar Rp21.651.517.800,- dan realisasi sebesar Rp17.672.072.973,- atau sebesar 81,62% dengan realisasi fisik sebesar 92,56%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika**.

Program ini melaksanakan 6 kegiatan, antara lain: **Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengembangan Telekomunikasi dan Telematika, (2)Kegiatan Penyelenggaraan Sarana Telekomunikasi dan Desiminasi Informatika, dan (3)Kegiatan Penyebarluasan Informasi Publik, dengan realisasi fisik sebesar 95,15% dan realisasi keuangan sebesar 82,15%, dan **Sekretariat Komisi Penyiaran Informasi Daerah** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran, (2)Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyiaran, dan (3)Kegiatan Fasilitasi Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi dengan realisasi fisik sebesar 89,96% dan realisasi keuangan sebesar 76,46%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,56% dan realisasi keuangan sebesar 81,62%.

4.1.25 Urusan Wajib Perpustakaan.

Pada Urusan Wajib Perpustakaan didukung oleh 2 Program dan 6 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Perpustakaan sebesar Rp5.883.452.500,- dan realisasi sebesar Rp5.368.847.278,- atau sebesar 91,25% dengan

realisasi fisik sebesar 94,70%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca.

Pelaksanaan program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan, (2)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat, dan (3)Kegiatan Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 95,40% dan realisasi keuangan sebesar 89,05%.

2. Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan.

Pelaksanaan program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Perpustakaan, (2)Kegiatan Pengelolaan Bahan Deposit, Otomasi Karya Cetak/Rekam dan Naskah Kuno Tentang Banten, dan (3)Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 93,99% dan realisasi keuangan sebesar 92,91%.

4.2 Penyelenggaraan Urusan Pilihan.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan sebesar Rp187.103.359.600,- dan realisasi sebesar Rp164.796.661.905,- atau sebesar 88,08% dengan realisasi fisik sebesar 97,77%. Adapun Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

4.2.1 Urusan Pilihan Pertanian.

Pada Urusan Pilihan Pertanian didukung oleh 4 program dan 57 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Pertanian sebesar Rp82.547.992.600,- dan realisasi sebesar Rp68.705.600.413,- atau sebesar 83,23% dengan

realisasi fisik sebesar 97,11%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pertanian dan Peternakan yang terbagi atas 34 kegiatan, antara lain: **Dinas Kehutanan dan Perkebunan** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Daya Dukung Pembangunan Perkebunan, (2)Kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan, (3)Kegiatan Perlindungan Tanaman Perkebunan, (4)Kegiatan Peningkatan Proteksi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman, dan (5)Kegiatan Pengembangan Benih Unggul Bermutu, dengan realisasi fisik sebesar 98,92% dan realisasi keuangan sebesar 90,00%, **Dinas Kelautan dan Perikanan** melaksanakan 13 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Laut, (2)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau, (3)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar, (4)Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Tawar (BBAT), (5)Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Tawar (BBAT), (6)Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Laut (BBIP), (7)Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Laut (BBIP), (8)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan dan Armada Perikanan, (9)Kegiatan Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap, (10)Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kepelabuhanan Perikanan Labuan, (11)Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Pelabuhan Perikanan (BPPP Labuan), (12)Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Budidaya Air Tawar (DAK), dan (13)Kegiatan Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (DAK), dengan realisasi fisik sebesar 98,15% dan realisasi keuangan sebesar 79,81%, dan **Dinas Pertanian dan Peternakan** melaksanakan 16 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Produk Sereal, (2)Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Aneka Kacang dan Umbi (Akabi), (3)Kegiatan Pengendalian Mutu Benih Tanaman Hortikultura, (4)Kegiatan Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Tanaman Pangan, (5)Kegiatan Pengendalian Mutu Benih Tanaman Pangan, (6)Kegiatan Pengembangan Varietas Tanaman Pangan dan Hortikultura, (7)Kegiatan Pengembangan Ternak Besar, Kecil dan Unggas, (8)Kegiatan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular, (9)Kegiatan Pengembangan Produksi dan Pemanfaatan Benih/Bibit Unggul, (10)Kegiatan Pengembangan Perbibitan Ternak Ruminansia, (11)Kegiatan Pengembangan Perbibitan Ternak Non Ruminansia, (12)Kegiatan Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular, (13)Kegiatan Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pelayanan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), (14)Kegiatan Peningkatan Produksi dan Pengembangan Komoditas Tanaman Buah dan Biofarmaka, (15)Kegiatan Peningkatan Produksi dan Pengembangan Komoditas Tanaman Hias dan Sayuran, dan (16)Kegiatan Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Hortikultura, dengan realisasi fisik sebesar 99,49% dan realisasi keuangan sebesar 84,18%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,57% dan realisasi keuangan sebesar 83,52%.

2. Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.

Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten yang terbagi atas 16 kegiatan, antara lain: **Dinas Kehutanan dan Perkebunan** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan Kebun, (2)Kegiatan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan Perkebunan, (3)Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan dan Kebun, (4)Kegiatan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan, dan

(5) Kegiatan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 88,38%, **Dinas Pertanian dan Peternakan** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, (2) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Sistem Pertanian Terpadu, (3) Kegiatan Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman Pangan, (4) Kegiatan Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman Hortikultura, dan (5) Kegiatan Penyediaan Teknologi Pasca Panen Peternakan, dengan realisasi fisik sebesar 99,38% dan realisasi keuangan sebesar 91,02%, dan **Dinas Kelautan dan Perikanan** melaksanakan 6 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan, (2) Kegiatan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan, (3) Kegiatan Pengembangan Bisnis dan Investasi, (4) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (DAK), (5) Kegiatan Pengelolaan Kompetensi dan Pelayanan Pengujian UPTD BPMHP Banten, dan (6) Kegiatan Pengendalian Mutu dan Perekayasaan Olahan Hasil Perikanan (BPMHP), dengan realisasi fisik sebesar 99,59% dan realisasi keuangan sebesar 68,20%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,66% dan realisasi keuangan sebesar 81,36%.

3. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.

Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Dinas Pertanian dan Peternakan yang terbagi atas 6 kegiatan, yaitu: **Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan** melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan (2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dengan realisasi fisik sebesar 96,61% dan realisasi keuangan sebesar 87,08%, **Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani, (2)Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan, dan (3)Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Kehutanan dan Perkebunan, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,80%, dan **Dinas Pertanian dan Peternakan** melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Pertanian, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 88,33%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,87% dan realisasi keuangan sebesar 88,30%.

4. Program Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten** dengan melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Pertanian. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 90,32% dan realisasi keuangan sebesar 67,42%.

4.2.2 Urusan Pilihan Kehutanan.

Pada Urusan Pilihan Kehutanan didukung oleh 1 program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Kehutanan sebesar Rp3.650.000.000,- dan realisasi sebesar Rp3.280.965.084,- atau sebesar 89,89% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan**.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, (2)Kegiatan Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Hutan, dan (3)Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Tahura Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 89,89%.

4.2.3 Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pada Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral didukung oleh 3 program dan 21 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp58.146.901.000,- dan realisasi sebesar Rp55.119.730.370,- atau sebesar 94,79% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Pelaksanaan Program ini melaksanakan 11 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Lebak), (2)Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Pandeglang), (3)Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP II (Kabupaten/Kota Serang dan Kota Cilegon), (4)Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP I (Kabupaten Tangerang), (5)Kegiatan Perencanaan Pembangunan Listrik Perdesaan, (6)Kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan, (7)Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten, (8)Kegiatan Peningkatan Penerapan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan di Provinsi Banten, (9)Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Penerapan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan di Provinsi Banten, (10)Kegiatan Pengembangan Potensi dan Pembinaan Perusahaan MIGAS, dan (11)Kegiatan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,42%.

2. Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Pelaksanaan Program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Teknik Pertambangan, (2)Kegiatan Pemetaan dan Perencanaan Teknis

Pengembangan Potensi Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi di Provinsi Banten, (3)Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertambangan, (4)Kegiatan Pemantauan dan Konservasi Potensi Air Tanah di Provinsi Banten, (5)Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Potensi Air Tanah di Provinsi Banten, (6)Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Data Mitigasi Geologi, dan (7)Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Air Tanah di Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,45%.

3. Program Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi.

Pelaksanaan Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Bidang Pertambangan dan Energi, (2)Kegiatan Promosi Potensi dan Produk serta Fasilitasi Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi, dan (3)Kegiatan Publikasi Data dan Informasi Bidang Pertambangan dan Energi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,61%.

4.2.4 Urusan Pilihan Pariwisata.

Pada Urusan Pilihan Pariwisata didukung oleh 2 Program dan 10 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Pariwisata sebesar Rp20.625.345.000,- dan realisasi sebesar Rp17.559.093.969,- atau sebesar 85,13% dengan realisasi fisik sebesar 90,70%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata.

Pelaksanaan Program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata, (2)Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (3)Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pariwisata, (4)Kegiatan Analisa Pasar Pariwisata, (5)Kegiatan Promosi Pariwisata dan

Budaya Banten, (6)Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi, dan (7)Kegiatan Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan KEK. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 87,07% dan realisasi keuangan sebesar 83,59%.

2. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisata.

Pelaksanaan Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengembangan Kemitraan Budaya dan Pariwisata, (2)Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pariwisata, dan (3)Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,33% dan realisasi keuangan sebesar 91,61%.

4.2.5 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan.

Pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan didukung oleh 1 program dan 4 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp2.319.809.291,- atau sebesar 92,79% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**.

Program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut, (2)Kegiatan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, (3)Kegiatan Pengendalian Sumberdaya Perikanan, dan (4)Kegiatan Penanganan Pelanggaran Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,79%.

Permasalahan dan Solusi

- a). **Permasalahan**
- b). **Solusi**

4.2.6 Urusan Pilihan Perdagangan.

Pada Urusan Pilihan Perdagangan didukung oleh 1 program dan 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Perdagangan sebesar Rp10.965.849.500,- dan realisasi sebesar Rp10.023.651.200,- atau sebesar 91,41% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan**.

Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengawasan Barang Jasa Beredar dan Kebutuhan Pokok Masyarakat, (2)Kegiatan Peningkatan Peran Pelaku Usaha dalam Kerjasama Perdagangan, (3)Kegiatan Peningkatan Akses Distribusi dan Bina Sarana Pasar bagi Komoditas Andalan Daerah, (4)Kegiatan Peningkatan Promosi dan Pemanfaatan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri, (5)Kegiatan Peningkatan Peran dan Fasilitasi Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah, (6)Kegiatan Pengembangan Sentra Pemasaran dan Lelang Produk Andalan Daerah, (7)Kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, dan (8)Kegiatan Penerapan Teknologi Aplikasi dan Kalibrasi Alat Ukur. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,41%.

4.2.7 Urusan Pilihan Industri.

Pada Urusan Pilihan Industri didukung oleh 1 program dan 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Industri sebesar Rp5.967.142.500,- dan realisasi sebesar Rp5.349.694.048,- atau sebesar 89,65% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Peningkatan Daya Saing Industri**.

Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Dukungan Pengembangan Industri Transportasi dan Telematika, (2)Kegiatan Dukungan Pengembangan Industri TPT dan Aneka, (3)Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Kualitas Aneka Produk

IKM, (4)Kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Industri, (5)Kegiatan Pengembangan Desain dan Diverifikasi Komoditas Kerajinan Berbasis Budaya Daerah, (6)Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Produk dan Keamanan Pangan Spesifik Daerah, (7)Kegiatan Pengembangan sektor IKM Kimia Provinsi Banten, dan (8)Kegiatan Peningkatan Dukungan Bagi Pembentukan dan Pengembangan Kluster Industri Mesin. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 89,65%.

4.2.8 Urusan Pilihan Ketrasmigrasian.

Pada Urusan Pilihan Ketrasmigrasian didukung oleh 1 program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Ketrasmigrasian sebesar Rp2.700.129.000,- dan realisasi sebesar Rp2.438.117.530,- atau sebesar 90,30% dengan realisasi fisik sebesar 94,36%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Penyiapan, Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi**.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengerahan dan Penyiapan Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi, (2)Kegiatan Fasilitas Perpindahan Transmigrasi, dan (3)Kegiatan Pembinaan Pasca Penempatan Transmigrasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,36% dan realisasi keuangan sebesar 90,30%.

4.3 Capaian Kinerja Program

Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2013-2015 yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Persentase Penduduk Miskin, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dibandingkan dengan angka target kinerja RPJMD pada tahun 2015 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2014

URAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	2013		2014		2015	
	TARGET RPJMD	REALISASI	TARGET RPJMD	REALISASI	TARGET RPJMD	REALISASI
1. I P M	73,47	71,87	74,02	69,89	74,57	n.a
2. L P E	6,5 -6,7%	5,86%	6,6-6,8%	5,47%	6,7-6,8%	n.a
3.Persentase Penduduk Miskin	5,5-5,2%	5,89%	5,3-5,0%	5,51%	5,1-4,8%	5,90*)
4.Persentase Pengangguran Terbuka	10,24%	9,90%	9,74%	9,07%	9,24%	8,58*)

Sumber : BPS Provinsi Banten, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2014-2015

Sub Bab ini juga menjelaskan realisasi capaian indikator kinerja pada setiap program yang diukur/dievaluasi capaiannya pada 78 program 246 indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja, terdapat **15 program yang capaian indikatornya masih kurang dari 80% yang tersebar pada 24 indikator kinerja**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.2
Capaian Indikator Kinerja Per Program
Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	47,00		
2	Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun	APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A	99,48		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho	99,54		
3	Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C	63,52		

4	Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1 / D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan (%)	2.383		
5	Pendidikan Tinggi	Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA (%)	7,03		
		Jumlah Prodi yang terakreditasi (unit)	5		
6	Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi)	Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (orang)	12.500		
7	Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,29		
		Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS (%)	10,00		
8	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%)	78,00		
		Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (Cakupan PN) (%)	91,00		
		Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)(%)	91,50		
9	Pembinaan Upaya Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%)	72,00		
		Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%)	92,00		
		Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%)	100,00		
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten (%)	90,00		
		Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONEK	100,00		

		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten (%)			
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten (%)			
		Pasien yang dilayani dan ditangani sesuai dengan indikasi dan kemampuan (%)			
		Waktu keberlangsungan pelayanan terpenuhi di semua bagian (%)			
		Pasien yang mendapatkan asuhan keperawatan (%)			
		Tenaga perawat yang mendapat pembinaan dan pengembangan (%)			
10	Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan	Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Immunization) dibawah 1 tahun di Desa/Kelurahan	100		
		Prevalensi HIV (%)	<0,5		
		Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan (%)	91,00		
		Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk	≤1		
		Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (%)	40,00		
		Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas (%)	77,00		

11	Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten (%)	100,00		
		Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas (%)	60,00		
12	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi (unit)	100		
		Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA (unit)	153		
		Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (Unit)	50		
		Prosentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten (%)	80,00		
		Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%)	100,00		
		Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya (orang)	32		
13	Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja	200,00		
		Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%)	60,00		
		Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%)	100,00		

		Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis (orang)	200,00		
		Lengkapnya pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (%)			
		Tersedianya data dan informasi sesuai kebutuhan dan kemampuan (%)			
14	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	89,00		
		Prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%)	92,00		
15	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis (ha)	2.534,82		
		Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi (%)	10,05		
16	Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman	Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (m ³)	1.826,25		
		Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/kel (lokasi)	112		
17	Program Pembinaan dan Penataan Perumahan	Penyelesaian Gedung KP3B	1		
		Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung	3		
		Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan (%)	20,00		
18	Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%)	3,83		
		Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok)	3		

		Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota (paket)	1		
19	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)	100,00		
20	Pengendalian Pembangunan Daerah	Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan (%)	100,00		
		Rasio Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan APBD (%)	100,00		
21	Kerjasama Pembangunan Daerah	Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah	3 Dokumen		
		Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri	100,00		
22	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian	Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan menjadi 100% tahun 2017	40,22		
		Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat laut dan udara sejumlah 100% tahun 2017	54,06		
23	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%)	20,00		
		Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup (%)	20,00		
24	Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya	Luas area rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	8.000		

	Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%)	20,00		
25	Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (%)	100,00		
26	Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL)	2 Kab/Kota		
		Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS) (%)	100,00		
		Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan lembaga lainnya (%)	20,00		
		Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG) (%)	100,00		
		Rasio Pembinaan Organisasi Wanita (BKOW dan lainnya) (%)	100,00		
		Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (P2WKSS, GSI, APE) (%)	100,00		
		Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan (Dalam dan Luar Provinsi) (%)	100,00		
27	Kependudukan dan Keluarga Berencana	Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan layanan Keluarga Berencana (orang)	80 Orang		
28	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan social	1.330 KK		

		Jumlah komunitas masyarakat terpencil yang diberdayakan	250 KK		
		Rasio pembinaan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan jenis PNPM lainnya) (%)	45,00		
29	Rehabilitasi Sosial	Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi	905 Org		
		Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi	1.156 Org		
		Jumlah Penyandang Cacat yang direhabilitasi	530 Org		
		Jumlah lembaga sosial anak yang dibina	20 Lbg		
		Jumlah tuna sosial yang direhabilitasi	680 Org		
		Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perlindungan dan bimbingan lanjut Balai Perlindungan Sosial (BPS)	307 Org		
		Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan sosial dan keterampilan dan bimbingan lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S)	450 Org		
30	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang dilindungi (Orang)	50 Org		
		Jumlah bantuan untuk korban bencana (Orang)	4.500 Org		
		Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilatih (Orang)	1.286 Org		
		Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan Sosial (Orang)	366 Org		

31	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina (Orang)	604 Org		
		Jumlah Kelembagaan sosial yang dibina (Lembaga)	550 Lbg		
		Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3)	400 Org		
		Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan (Orang)	200 Org		
		Cakupan kegiatan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan	12 keg.		
		Cakupan kelembagaan kelompok/badan/lembaga/ organisasi keagamaan yang terfasilitasi	600 lembaga		
32	Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja (%)	4,29		
33	Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap Tahunannya (%)	11,06		
34	Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja	Cakupan kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kesempatan Tenaga Kerja	528 org		
35	Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM	Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan (%)	16,28		
		Tingkat pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan (%)	16,28		

36	Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM	Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk koperasi dan UMKM (%)	27,00		
		Tingkat layanan akses akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM (%)	27,00		
37	Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM	Pesentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktivitas Koperasi dan UMKM (%)	18,66		
38	Peningkatan Iklim Investasi	Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal (%)	25,00		
39	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp)	9.38 Trilyun		
40	Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan (%)	20,00		
		Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat (%)	20,00		
		Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal (%)	17,65		
		Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan (%)	20,37		
41	Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan pembinaan lembaga yang terbina sadar politik (%)	363		
		Cakupan pembinaan lembaga yang sadar kerukunan (%)	426		

		Cakupan kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah (%)	100,00		
42	Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	Rasio Fasilitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum (%)	100,00		
		Rasio Fasilitas Administrasi Pertanahan (%)	100,00		
		Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa	2 Dokumen		
		Rasio Kegiatan Fasilitas LPSE Provinsi Banten (%)	100,00		
		Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah(%)	4,50		
		Pengembangan dan Peningkatan Lembaga Keuangan daerah	9 Unit		
		Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah	10 Dokumen		
		Pengembangan Pelayanan Publikasi, Kerjasama Jaringan Media dan Informasi	100,00		
		Peningkatan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Dokumentasi	100,00		
		Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi	100,00		
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	16 Dokumen		

43	Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Rasio Pengamanan, Pengawasan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah (%)	100,00		
		Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00		
		Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan	100,00		
		Rasio Pendataan dan Tindaklanjut Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan(%)	100,00		
44	Penanggulangan Bencana	Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (%)	100,00		
		Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana. (%)	100,00		
		Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana (%)	100,00		
45	Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah	Rasio fasilitas pengelolaan perlengkapan dan aset daerah (%)	100,00		
46	Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	3.838 T		
		Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah (unit)	2 Unit		
		Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)	3 Unit		

		Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (%)	100,00		
		Cakupan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi (%)	100,00		
47	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Rasio ketersediaan dokumen penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Lembaga lain bagian perangkat daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah. (%)	100,00		
48	Pembinaan Karier dan Administasi Kepegawaian Aparatur	Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten .(%)	100,00		
		Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian .(%)	100,00		
		Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur .(%)	100,00		
49	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur .(%)	100,00		
		Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur .(%)	100,00		
50	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100,00		

		Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100,00		
51	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100,00		
		Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah	100,00		
		Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100,00		
		Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian	100,00		
52	Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Rasio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur.(%)	100,00		
53	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah	100,00		
		Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD	100,00		
		Jumlah Dukungan Layanan Komunikasi, Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD	100,00		

		Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD	100,00		
		Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100,00		
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung AKD	100,00		
54	Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM	Rasio ketersediaan Dokumen Produk Hukum (%)	20,00		
		Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum & HAM (%)	100,00		
55	Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK	Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (dok)	34 Dokumen		
56	Ketahanan Pangan Masyarakat	Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	200 Ton		
		Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (ton)	712,02		
		Jumlah lembaga cadangan pangan masyarakat (Lembaga)	72 Lembaga		
		Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin (%)	100,00		
		Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat (Skors PPH)	93		
		Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (Kecamatan)	10		
		Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra produksi (%)	60,00		

57	Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan	Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	80,00		
		Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kel (%)	12,00		
		Cakupan Pengembangan Inovasi dan Pemasarakatan Teknologi Tepat Guna	Gelar TTG Tingkat Nasional		
		Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes) (%)	85,00		
		Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa) (%)	5,00		
		Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM (%)	6,38		
		Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD)	6 desa/kel		
		Cakupan pengembangan Pemerintahan Desa	1.261 desa		
58	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	41 Paket		

59	Pembinaan Kearsipan Daerah	Persentase SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan (%)	32 (74%)		
		Persentase cakupan koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota (%)	32 (74%)		
60	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika	Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sejumlah 100% tahun 2017. (%)	85,26		
		Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Lembaga Penyiaran (%)	40,00		
		Cakupan Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi (%)	40,00		
		Cakupan Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (%)	100,00		
61	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Tingkat kunjungan perpustakaan per hari (%)	320 (64%)		
		Meningkatnya kunjungan ke website BPAD (%)	80 (64%)		
62	Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai standar (%)	26 (62%)		
63	Kepemudaan dan Kepramukaan	Jumlah organisasi pramuka yang mendapatkan pelayanan Kepramukaan (unit)	9 kwartir		
		Jumlah Kelompok/ Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan (kel)	16 klp		

64	Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga	Rasio Cabang Olahraga Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat nasional/regional (event)	19 cabor/ 18 event		
		Tingkat pemenuhan prasarana dan sarana olahraga	1 unit		

Tabel 4.3
Capaian Indikator Kinerja Per Program
Pada Penyelenggaraan Urusan Pilihan

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Peningkatan Produksi Padi (GKG) (ton)	2.237.344		
		Surplus Beras (ton)	56.855		
		Penyediaan Benih Sumber Padi (ha)	30.000,00		
		Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Padi (ha)	80.000		
		Produksi Hortikultura (Durian, Manggis, Melon, Cabe Besar) (ton)	29.342		
		Produksi Daging (sapi dan kerbau) (ton)	32.669.754		
		Cakupan peningkatan upaya-upaya rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan (ha)	500		
		Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan (unit)	3		

		Jumlah unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata) (unit)	1		
		cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan perkebunan (unit)	3		
		Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas (batang)	107.000		
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	68.025		
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	> 100		
		Jumlah Produksi Benih Ikan (Milyar Ekor)	1,5		
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	170.000		
2	Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Nilai Tukar Petani (NTP)	105		
		Cakupan Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) / Standar Operational Procedure (SOP) Hortikultura (unit)	4		
		Cakupan kemitraan Kelompok Tani dan Dunia Usaha (unit)	9		
		Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan (unit)	6		
		Cakupan tingkat kemandirian tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan perkebunan (unit)	250		
		Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	0,77		
		Jumlah Ekspor Perikanan (Ton)	3.250		
		Tingkat Kosumsi Ikan (Kg/Kapita)	28		

3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pertanian (unit)	5		
		Cakupan Peningkatan Akses Kelompok tani terhadap Perbankan (unit)	26		
		Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan (unit)	2		
		Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri (unit)	20		
4	Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian	Cakupan ketersediaan Traktor (unit)	31		
		Cakupan ketersediaan Rice Milling Unit (RMU) (unit)	2		
		Cakupan Pengembangan Jaringan Irigasi (Ha)	3.500		
5	Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan	Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan (unit)	6		
		Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan (kelompok)	10		
6	Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Tingkat penambahan jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang (SS)	25.000		
		Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B (%)	314		
		Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan (Unit)	100		

7	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (Dok)	9		
		Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah (unit)	4		
8	Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi	Cakupan layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi (ijin)	10		
		Cakupan layanan Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi (Dokumen)	1		
		Cakupan layanan informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan (unit)	4		
9	Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata (%)	20,00		
		Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata (%)	23,08		
		Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata (%)	20,00		
		Meningkatnya promosi wisata dalam negeri dan luar negeri (%)	19,84		
10	Pengembangan Kemitraan Kepariwisata	Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah (%)	20,00		

		Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata (%)	19,67		
		Rasio peningkatan kapasitas sumber sumber daya manusia pariwisata dan instansi lainnya (%)	19,53		
11	Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Luas Areal Konservasi Laut (Ha)	1		
		Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan (Kasus)	12		
12	Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kelancaran Distribusi Perdagangan/Pasar tradisional (%)	20,00		
		Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa (%)	20,00		
13	Peningkatan Daya Saing Industri	Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri (%)	20,00		
		Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri (%)	20,00		
		Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi Produk (%)	20,00		
		Cakupan Kemitraan Usaha dan Pengembangan klaster industri (%)	20,00		



14	Penyiapan, pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi	Cakupan Penyiapan, Pelayanan, Pembinaan, dan Kebutuhan Masyarakat Transmigran Serta Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat (KK)	350 KK		
		Cakupan Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi (KK)	185 KK		